

# KEARIFAN LOKAL PADE GELAHANG DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI SUBAK

Dewa Kadek Darmada  
Anantawikrama Tungga Atmadja  
Ni Kadek Sinarwati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Indonesia  
Surel : darmada.dewa@rocketmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>



*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*  
**JAMAL**  
Volume 7  
Nomor 1  
Halaman 1-155  
Malang, April 2016  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**06 November 2015**  
Tanggal Revisi:  
**24 Januari 2016**  
Tanggal Diterima:  
**09 Februari 2016**

**Abstrak: Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan di *subak Delod Sema* dan akuntabilitas pengelolaan keuangan didasarkan pada kearifan lokal *Pade Gelahang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian yaitu: 1) proses pengelolaan keuangan melibatkan *prajuru subak*, 2) proses pengelolaan keuangan terbagi internal dan eksternal, 3) pertanggungjawabannya dilakukan secara sederhana, dan 4) praktik akuntabilitas tidak lepas dari kearifan lokal *Pade Gelahang*.

**Abstract: Pade Gelahang Local Wisdom for Integrating Accountability Financial Management in Subak Organization.** The purpose seeks financial management process was done in *Subak Delod Sema* with based on local wisdom *Pade Gelahang*. The study uses qualitative method. All data were obtained from interview, observation and documentation, than analysis was conducted by data reduction, presentation, analysis and conclude. The results are: 1) the process of financial management involve *subak panjuru*, 2) the financial management divided into internal and external), 3) accountability of financial management is simple, and 4) the practice of accountability not be separated from local wisdom *Pade Gelahang*.

**Kata Kunci:** *Subak*, akuntabilitas, *Pade Gelahang*, pengelolaan keuangan

Sistem *subak* merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. *Subak* di Bali memiliki lima ciri meliputi; 1) *subak* merupakan organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki pengurus dan peraturan organisasi (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis, 2) mempunyai suatu sumber air bersama berupa bendungan (*empelan*), 3) memiliki suatu areal persawahan, 4) terdapat otonomi baik internal maupun eksternal, dan 5) memiliki satu atau lebih pura yang berhubungan dengan *persubakan*. Hal tersebut mengandung makna kebersamaan dan sistem gotong royong yang diterapkan pada organisasi *subak*. Para pakar petani yang merupakan anggota *subak* beranggapan bahwa *subak* mampu mengambil peran untuk turut serta melestarikan lingkungan

serta membantu mewujudkan kemajuan daerah. Hal ini dipandang dari filosofi *Tri Hita Karana* yang diemban, meliputi *Parhayangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan sesamanya) dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) (Griadhi 1993).

*Subak Delod Sema* merupakan *subak* yang berada pada batas wilayah antara Kampung Jarat (Islam) dan warga Penarukan. Pada organisasi *subak* ini tentunya *krama subak* berasal dari dua latar belakang agama yang berbeda. Keanggotaan dari *Subak Delod Sema* Desa Penarukan sudah menjadi turun-temurun saat keberadaan nenek moyang orang Islam di Bali. Pertumbuhan satuan *subak* dalam beberapa periode ini cenderung meningkat karena adanya

pemakaran subak-subak pada tiap daerah baik Kabupaten maupun Provinsi (Wardi *et al.* 2014). *Subak* yang multikultur menjadi fenomena yang unik sekaligus menarik jika dikaji dalam hal integrasi dan proses akuntabilitas keuangan organisasi *subak* tersebut. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (sistem *check and balances*) dalam organisasi profit dan non profit. Pertanggungjawaban keuangan *subak* didasarkan atas filosofi yaitu; laporan keuangan *subak* menjadi tanggung jawab bersama, sistem pengelolaan baik mengenai pengeluaran saat upacara *Ngusaba Desa*, dana bantuan dari pmda untuk kegiatan *subak* yang bernuansa Hindu, pengelolaan pembagian air atau *tembuku*, ekonomi produktif dan sebagainya juga harus diketahui oleh anggota *subak* yang beragama Islam. Cara pandang anggota *subak* dalam laporan keuangan *subak* sudah terintegrasi dengan memaknai keberadaan kearifan lokal yang melandasi pertanggungjawaban keuangan.

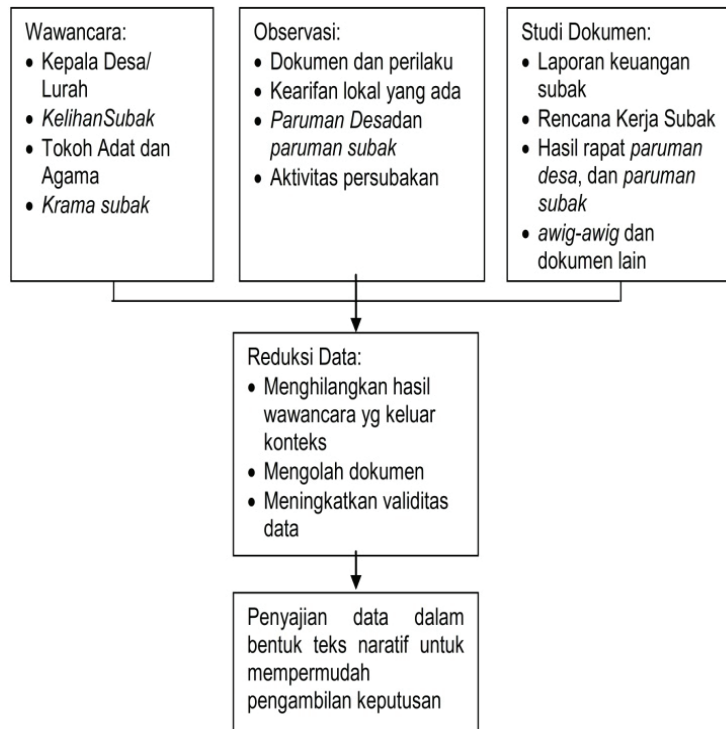
Yulianita (2008) dalam penelitiannya menjadikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai organisasi sosial keagamaan di Bali yang mengemukakan bahwa praktik akuntabilitas pada LPD berkaitan dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu dimensi hubungan manusia dengan manusia (akuntabilitas ekonomi dan sosial), manusia dengan lingkungan (akuntabilitas ekologi) dan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual). Hal ini berarti akuntabilitas pada LPD tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental juga aspek spiritual. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) mengungkap praktik akuntabilitas di sektor *Desa Pakraman* Kubutambahan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas di desa bersangkutan menggunakan sistem pertanggungjawaban akuntansi sederhana dan dikaitkan dengan kepercayaan untuk menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain dari Widnyani *et al.* (2015) yang bertujuan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan sumber daya lembaga lokal *subak* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di desa juga menunjukkan bahwa dalam hal membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh *krama*

*subak* menjunjung tinggi konsep dan nilai-nilai agama Hindu dan memupuk rasa saling percaya dengan sesama *krama subak*.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mencari makna kearifan lokal yaitu *Pade Gelahang* pada organisasi lokal *Subak Delod Sema* Desa Penarukan terutama dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan dalam organisasi *subak* di *Subak Delod Sema* Desa Penarukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjelaskan implikasi hasil jika suatu pertanggungjawaban keuangan dilandasi dengan nilai kearifan lokal dan jika suatu transaksi terjadi dengan mengabaikan nilai kearifan lokal yang dihadapkan dengan keberadaan *subak* multikultur.

## METODE

Paradigma penelitian merupakan kerangka pengelompokan teori dan penelitian yang meliputi seperangkat asumsi dasar, isu-isu yang dianggap penting, berbagai model penelitian, dan metode-metode untuk menemukan jawaban atas keingintahuan tertentu (Neuman 2011). Berdasarkan pada hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dititikberatkan pada deskripsi dan interpretasi perilaku manusia. Penelitian kualitatif terdiri dari beberapa jenis yang mana salah satunya adalah interpretivisme. Paradigma tersebut merupakan model ilmu sosial yang menganggap bahwa realita sosial yang terjadi tidak akan pernah terlepas dari aspirasi pelakunya dan terjadi secara sosial (Hopper dan Powell 1985). Demikian pula menurut Ikbar (2012) bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, maka sasaran penelitian ini bukan pada pengukuran (kuantitas) melainkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif para partisipan. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar yang berlaku pada paradigma fenomenologi yang melandasi metode penelitian kualitatif antara interaksi yang terjadi dalam suatu lembaga yang sangat tergantung pada pemaknaan. Lokasi penelitian dilakukan pada organisasi *Subak Delod Sema* di Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang mana *subak* tersebut beranggotakan dari *krama subak* dengan latar belakang agama yang berbeda.



**Gambar 1. Alur Metode Penelitian**

(Sumber: Penulis, 2015)

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer yaitu didapatkan langsung dari informan, serta sumber sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan atau artikel. Beberapa teknik dipergunakan secara triangulasi agar keabsahan data terjamin. Informan penelitian ini ditunjuk secara *purposive sampling* sesuai dengan kriterianya yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang akan dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, posisi dalam kelembagaan organisasi, mewakili kelompok-kelompok sosial yang ada, dan keterkaitan fungsional mereka terhadap struktur organisasi *subak*, para tokoh adat dan agama, Kepala/ *Kelihan Subak*, dan instansi terkait lainnya. Begitu pula *Kelihan Subak* ditunjuk sebagai informan kunci, lalu dikembangkan *snow-ball* untuk menunjuk orang-orang yang terkait dengan pengelolaan organisasi *subak*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Moleong (2005) yaitu; 1) Reduksi data (*data reduction*), 2) Penyajian data (*data display*), dan 3) Analisa data dan penarikan simpulan (*verifikasi*) berdasarkan teori yang telah

ditentukan. Atmadja (2013) menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penarikan simpulan dan penyajian data merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir yang bersifat holistik dan sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Sistem Pengelolaan Keuangan Subak Delod Sema Desa Penarukan.** *Subak* merupakan suatu organisasi atau lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pengelolaan air (sistem irigasi) serta untuk mengatur sistem pengelolaan pertanian yang bersifat sosial, religius serta mandiri yang anggotanya terdiri atas petani yang berada pada suatu wilayah tertentu yang pelaksanaannya diatur berdasarkan *awig-awig*. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga lokal *subak* bukan hanya sebatas pengaturan sistem pengelolaan air semata, tetapi *subak* juga mengoordinir kegiatan yang bersifat sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Hal ini disebabkan karena *subak* merupakan organisasi tradisional yang berlandaskan atas *Tri Hita Karana*. Hal yang

bersifat religius dan spiritual tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini termasuk bidang bisnis, karena hal itu akan mengeliminasi antara hal yang bijak dengan ketamakan pada semua makhluk hidup dan lingkungan (Field 2007). Demikian pula Peritiwi dan Ludigdo (2013) dan Budiasih (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan religius-spiritualitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sumber-sumber pendapatan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan berasal dari internal dan eksternal. Pendapatan dari internal meliputi peturunan dari para krama *subak* dan hasil pengembangan usaha ekonomi produktif. Sedangkan sumber pendapatan eksternal berasal dari dana bantuan Pemda. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelihan Subak Delod Sema*, diperoleh informasi bahwa peturunan yang dibayarkan oleh *krama* tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya. Hal ini hanya akan terjadi pada saat dana kas *subak* memang sedang membutuhkan tambahan. Seperti hasil kutipan wawancara berikut ini:

“kas *subak nike* (itu) *kan* berasal dari internal dan eksternal. Internalnya *nike* (itu) seperti *peturunan* (iuran) dan hasil simpan pinjam *nike* (itu). *Subak Delod Sema nike kan medue* (*Subak Delod Sema* itu juga memiliki koperasi tani, *kenten* (begitu). *Yen peturunan masi nak sing* (jika iuran itu juga tidak tentu *mayah* (bayar), *yen* (kalau) kas *ampun* (sudah) kurang *pas wenten upakara* (tepat ada upacara) atau kegiatan lain, *nah drike wau nudukin kenten* (pada saat itu baru meminta iuran).”

Dari pemaparan tersebut di atas, *peturunan* bukanlah sumber satu-satunya kas *Subak Delod Sema*. *Subak* ini juga memiliki sumber pendapatan internal lain yang berupa ekonomi produktif lewat usaha simpan pinjam. Koperasi *Subak Delod Sema* ini bergerak dalam simpan pinjam, yang mana koperasi ini bernama KUD Tirta Luhur. Selain itu, pendapatan yang berasal dari eksternal adalah bantuan atau hibah dari Provinsi Bali. Diketahui bahwa besarnya bantuan Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 30.000.000. Untuk tahun 2015, *Subak Delod Sema* sudah menganggarkan bantuan lewat proposal sebesar Rp 40.000.000.

Pada pengelolaan keuangan baik sumber internal dan eksternal, tidak hanya *Petengen Subak Delod Sema* saja yang bekerja, tetapi ada pula pihak-pihak yang membantu, misalnya saja *Kelihan Subak* dan *Penyarikan*, serta persetujuan penggunaan uang dari *krama*. Kalau hanya dilakukan oleh *Petengen*, mungkin akan menjadi beban tersendiri dan menyulitkan, bantuan dan pengawasan dari prajuru lain serta *krama* juga perlu dilakukan. Misalnya saja dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun 2014, *Kelihan* dan *Penyarikan* juga turut membantu proses penyusunannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *Penyarikan Subak Delod Sema*, Bapak I Wayan Rian, sebagai berikut:

“Dalam penyusunan laporan keuangan *nike* (itu), *tyang* (saya) ikut terlibat. Karena kan masalah nota, pencatatan administrasi *nike tyang* (itu saya) yang memegang. Jadi *petengen* (bendahara) juga kadang kurang paham, makanya *tyang* (saya) bersama *kelihan* (kepala) dan *krama* (anggota) lain ikut membantu. Biar juga *enggal masi* (cepat juga) selesai laporannya, karena kan selesai kegiatan laporan harus sudah jadi, *kenten* (begitu).”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan ini didasarkan pada proses yang saling terkait. Mengingat keuangan *subak* juga menjadi keuangan yang perlu transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, mengingat *Subak Delod Sema* adalah *subak* yang multikultur dari dua latar belakang agama yang berbeda. Adapun tiga tahapan utama tersebut, yaitu:

1. Tahap penerimaan kas dari berbagai pos pendapatan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan yang melibatkan *prajuru subak*,
2. Tahap pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai keperluan, dan
3. Tahap pertanggungjawaban penggunaan dana tau kas *Subak Delod Sema* Desa Penarukan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Prajuru Subak Delod Sema*, diketahui bahwa pengelolaan dana bantuan pemerintah dibagi menjadi beberapa aspek. Adapun program-program yang rutin dilaksanakan

di *Subak Delod Sema* yang mempergunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali adalah program Ekonomi Produktif (Simpan Pinjam), Dana Operasional *Pekaseh*, Dana Operasional *Prajuru* lainnya, Dana Penunjang Administrasi *Subak* dan Pembangunan Pemuduk *Subak*. Ekonomi Produktif merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk seluruh *subak* yang ada di Bali. Kebijakan program ekonomi produktif ditentukan oleh masing-masing *subak*. Untuk *Subak Delod Sema* sendiri melaksanakan program ekonomi produktif dengan melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam (SP). Seluruh *krama subak* berhak mendapatkan dana pinjaman, tetapi orang-orang yang akan diberikan pinjaman ditentukan melalui suatu *sangkep*. Pada tahun 2014, dana yang dipergunakan dalam program simpan pinjam ekonomi produktif *Subak Delod Sema* sebesar Rp 5.000.000,00 dengan jumlah peminjam sebanyak lima orang. Jangka waktu pengembaliannya adalah selama satu tahun, dengan bunga yang sangat rendah. Program Ekonomi Produktif (Simpan Pinjam) untuk tahun 2014 telah diterima oleh *krama subak*, masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Adapun *krama* yang mendapatkannya sesuai hasil *pararem*, yakni Made Tangkas, Wayan Semara, Wayan Baghiyasa, Gede Sarba dan Wayan Kama. Menurut penuturan Bapak Nyoman Sugiarta, peningkatan ekonomi produktif ini sudah didasarkan pada hasil *pararem* dan *krama* yang mendapatkannya pun digilir, sehingga semua rata menerima.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Operasional *Prajuru* adalah pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional *subak*. Kegiatan operasional *prajuru* yang dilakukan oleh *krama Subak Delod Sema* pada tahun 2014 adalah gotong royong pembangunan fisik *subak*. Pengeluaran kas yang dilakukan adalah pembelian konsumsi untuk segenap *prajuru* dan *krama subak*, serta *banten* yang dihaturkan untuk memohon kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan operasional *prajuru*, ada juga biaya-biaya operasional lain seperti biaya perjalanan dinas *prajuru*, biaya perjalanan *nunas tirta* ke Pura Ulun Danu Batur dalam rangka pelaksanaan upacara *ngusaba*, biaya perjalanan sosialisasi pembangunan air bersih di Kantor Camat Sawan dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) lainnya. Dana administrasi *subak* dapat dari pengeluaran-pengeluaran selama operasional *Subak Delod Sema*, baik yang menyang-

kut hal-hal surat-menyurat, pembuatan proposal dan meterai yang diperlukan. Besarnya dana ini mencapai Rp 800.000 untuk tahun anggaran 2014 dan sudah diterima langsung oleh *Petengen Subak Delod Sema* sendiri.

Program selanjutnya yang dilaksanakan dengan mempergunakan Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Bali adalah pembangunan. Program pembangunan merupakan program dengan anggaran dana yang paling besar, yaitu 66,67% (Rp 15.000.000) dari jumlah keseluruhan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Bali. Setiap tahun, *subak* melakukan pembangunan sarana baru atau perbaikan terhadap sarana yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung kegiatan operasional *subak*, baik pembangunan yang mendukung di bidang pengelolaan sawah, seperti irigasi, pembangunan atau perbaikan yang bersifat religius (perbaikan pura), maupun pembangunan sarana pendukung kegiatan sosial masyarakatan *subak*, seperti *balai subak*.

Dana eksertal *subak* selanjutnya adalah dana yang bersumber dari Hibah Gubernur Bali Tahun 2014, yang diajukan kemarin lewat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jumlah bantuan yang diberikan untuk tahun 2014 mencapai Rp 30.000.000. Berdasarkan keterangan yang didapat dari pengurus *subak*, diketahui bahwa pengelolaan sumber dana eksternal *subak* dari pemerintah provinsi dilakukan secara bersamaan.

Praktik yang bersih merupakan syarat terpenuhinya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dalam dimensi akuntabilitas publik yang disampaikan oleh Mardiasmo (2000). Menurut Mardiasmo bahwa akuntabilitas kejujuran lebih menyangkut pada penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait pada jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Selain itu, kepercayaan *krama subak* yang diberikan kepada *prajuru subak* dalam melakukan pengelolaan keuangan merupakan cerminan dari ajaran agama yang tidak boleh dipermainkan.

**Peran Pade Gelahang Sebagai Kearifan Budaya Lokal Dalam Integrasi Akuntabilitas Keuangan Subak di Subak Delod Sema Desa Penarukan.** *Subak* merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi

formal lainnya. Sebagai suatu organisasi tradisional masyarakat adat Bali, *subak* tentunya memiliki kedekatan langsung dengan *krama subak*, karena senantiasa menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Meskipun hanya merupakan organisasi pengelola air yang sifatnya masih tradisional, tetapi *subak* senantiasa dapat menyiratkan unsur-unsur universal dan mendasar dari organisasi modern. *Subak* merupakan organisasi yang tanggap dengan perkembangan ilmu dan teknologi, oleh karena itu *subak* juga mampu mewujudkan citra organisasi yang akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan proses pertanggungjawabannya.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Meskipun hanya merupakan organisasi tradisional dengan lingkup yang kecil, *Subak Delod Sema* senantiasa mengontrol kinerjanya agar dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama disampaikan oleh *Kelihan Subak Delod Sema* dalam kutipan wawancara berikut:

“*Yen tyang* (kalau saya) memandang *nggih*, pertanggungjawaban keuangan *nike* (itu) sangat penting. Apalagi di *Subak Delod Sema niki* (ini) uang *kan* milik bersama, terus *wenten* (ada) dua agama yang berbeda *nike* (itu) *kan* rentan konflik. *Makane* (maka dari itu) masalah keuangan *tyang* (saya) selalu kordinasikan dan laporkan.”

Pernyataan *Kelihan Subak Delod Sema* diatas juga diperkuat lagi dengan pernyataan *Petengen Subak Delod Sema* berikut ini:

“Pertanggungjawabannya *nike* (itu) sangat perlu *nggih*. *Niki* (ini) berbicara uang *kan* sesuatu *sane kewehe-kewehe aluh* (sulit-sulit mudah), kalau dibilang. Tidak hanya organisasi *sane* (yang) besar saja, tetapi mungkin *sampun* (sekarang sudah) modern, *sami* (semua) tahu uang, kemana aliran uangnya, untuk apa-apa saja, *sami krama* (semua anggota) jeli

akan itu. *Makane* (maka dari itu) pertanggungjawaban *niki* (ini) sangat penting, walau di *subak niki* (ini) hanya sederhana bentuk pembukuannya.”

Berdasarkan pernyataan *Petengen Subak Delod Sema* diatas diketahui bahwa tujuan utama penyajian pertanggungjawaban kepada *krama subak* adalah untuk memperkuat unsur akuntabilitas dan transparansi yang disajikan di *subak*. Selain itu, pemahaman prajuru akan pembukuan yang masih terbatas, maka dari itu pengurus *subak* senantiasa berusaha menyajikan pertanggungjawaban dalam bentuk yang baik, meskipun tidak mengacu pada standar-standar akuntansi. Sistem pertanggungjawaban keuangan *subak* dibedakan menjadi dua, berdasarkan sumber dananya. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara, sebagai berikut:

“Kalau yang dari bantuan pemerintah laporannya dibuat sama dengan contoh dari lurah, lengkap, melampirkan kwitansi, laporan kegiatan, foto, nota, dan dijilid. Kalau laporan keuangan *Ngusaba Desa nike* (itu) lebih sederhana.”

Pernyataan dalam kutipan wawancara diatas disampaikan oleh *Petengen Subak Delod Sema*, menjelaskan perbedaan antara kedua jenis laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus *Subak Delod Sema* dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan bersifat lebih lengkap, lebih rapi dan terstruktur. Sedangkan laporan pertanggungjawaban sumber dana internal *subak* dalam pelaksanaan Upacara *Ngusaba Desa* dibuat dengan lebih sederhana. Kedua jenis pertanggungjawaban keuangan yang berbeda tersebut tidak lantas membuat *krama subak* menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari *prajuru subak*. Rasa saling percaya yang tinggi membuat *krama subak* tidak pernah mempermasalahkan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pengurus *subak*. Rasa ini merupakan wujud dari kuatnya budaya lokal *Pade Gelahang*. *Pade Gelahang* telah menjadi landasan kuat, disamping *Tri Hita Karana*. Rasa memiliki bersama, saling

menolong dan solidaritas yang tinggi di antara krama menjadi gambaran sosial yang ada di *Subak Delod Sema*. Dalam praktik akuntabilitas pun, *Pade Gelahang* muncul dalam setiap insan *krama subak*, baik antara *krama* Hindu maupun Islam. Mereka berintegrasi memaknai praktik akuntabilitas dalam *Subak Delod Sema* dengan landasan konsep *Pade Gelahang* tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh *Kelihan Subak Delod Sema*, Bapak Nyoman Sugiarta, sebagai berikut:

“Dalam pertanggungjawaban *subak driki* (disini) memegang budaya lokal *Pade Gelahang*. Jadi apapun yang disampaikan dalam *sangkep/ pararem* (rapat), *krama* (anggota) pasti selalu percaya. Begitu juga *prajuru* tidak menyalahgunakan kepercayaan *nike* (itu). Jadi semua pertanggungjawaban *nike* (itu), dianggap milik bersama. Bukan hanya baru *prajuru* yang bawa uang, *prajuru* saja yang mempertanggungjawabkan, tetapi semua *krama* bersama-sama membantu *prajuru* dalam pertanggungjawabannya.”

Meskipun memiliki perbedaan dalam sistem penyajiannya, *prajuru subak* senantiasa menjamin akuntabilitas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangannya. Terlebih lagi, kedua pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada seluruh *krama subak* dalam suatu *sangkep* (rapat) yang dilaksanakan setiap *buda wage* (rabu *wage*) atau hari-hari tertentu jika memang diperlukan *sangkep*.

Triuwono (2012) menyatakan akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (*complicated social interaction*). *Subak Delod Sema* menciptakan esensi akuntabilitas dan transparansi dengan mempergunakan kearifan lokal yang berkembang. Budaya lokal yang ada di *subak*, dipandang mampu menjadi cermin dalam melaksanakan aktivitas persubakan. Sehingga itikad untuk melakukan hal-hal di luar *awig-awig* dan hasil *pararem* dapat diminimalisir.

Menurut Lestari (2014) Konsep akuntabilitas merupakan konsep yang dapat dikaitkan dengan spiritual. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki cakupan yang luas, bukan hanya pertanggungjawaban finansial, melainkan pertanggungjawaban

yang lebih menekankan pada akuntabilitas intern dan ekstern. Bapak Dewa Putu Merta memberikan kepercayaan kepada pengurus *subak* atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Selain itu, mereka telah bekerja bersama-sama di *subak* selama puluhan tahun, sehingga beliau merasa bahwa tidak akan ada kecurangan yang dilakukan oleh pengurus *Subak Delod Sema*:

“*Tyang nak tetep percaya nggih, yen di paruman masi tyang* (saya selalu percaya, di rapat juga saya) melihat kinerja *prajuru sami* (semua) bagus. *Driki kan pun wenten istilah Pade Gelahang* (disini kan sudah ada *Pade Gelahang*). Jadi *sami* (semua) saling percaya”

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang diperlukan agar organisasi dapat mencapai predikat *good governance*. Lestari (2014) menjelaskan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* perlu adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian halnya dengan *Subak Delod Sema*, tanpa disadari pengurus dan seluruh *krama subak* telah menerapkan keempat syarat *good governance* yang dijelaskan diatas. Asas transparansi tercermin dari terbukanya pengelolaan keuangan *subak* tabola terhadap seluruh *krama subak*. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* dijabarkan dan diumumkan kepada *krama subak* secara keseluruhan dalam suatu rapat khusus yang dilaksanakan dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *subak*.

Asas kedua yang diperlukan dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa akuntabilitas merupakan hal yang telah berhasil diwujudkan dan dijaga oleh pengurus *Subak Delod Sema*. Oleh karena itu pengurus *subak* senantiasa mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh *krama subak*. Asas selanjutnya adalah asas kewajaran atau kesetaraan. Kesetaraan memiliki arti sama, dalam hal ini adalah kesempatan yang sama bagi seluruh bagian organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Tentunya asas ini sebagai wujud dari kearifan lokal *Pade Gelahang* yang sudah mendarah daging di antara *krama Subak Delod Sema*. *Subak* merupakan or-

ganisasi tradisional masyarakat adat Bali yang memiliki unsur kebersamaan yang kuat. Setiap masalah senantiasa dipecahkan bersama melalui sistem musyawarah mufakat. Demikian halnya dalam pengambilan keputusan, seluruh *krama* memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapatnya untuk mencapai mufakat, tanpa memandang latar belakang *krama*.

*Pade Gelahang* sebagai salah satu landasan budaya lokal yang kuat, sebagai pijakan dari *Subak Delod Sema* juga menjadi pengontrol selanjutnya, karena tanpa kearifan ini mustahil *Subak Delod Sema* yang multikultur ini dapat ajeg dan berlanjut. Sistem kontrol yang diberikan adalah sejauh mana *krama Subak Delod Sema* mampu memaknai konsep *Pade Gelahang* jika dikaitkan dengan praktik akuntabilitas di organisasi *subak*. Semakin tinggi pemahaman *krama*, maka kontrol dari kearifan ini dapat dikatakan sukses, dan begitu pula sebaliknya. Rasa kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan saling memiliki yang tinggi di antara *krama subak* telah menjadikan satu ikatan dari dua latar belakang agama yang berbeda yakni Hindu dan Islam, untuk selalu bergerak dalam satu visi dan misi *subak* yaitu dalam satu wadah *Pade Gelahang*. Namun eksistensi *Subak* ini perlu tetap dipertahankan turun temurun kepada generasi yang lebih muda karena bisa jadi budaya ini akan luntur dan hilang dari masa ke masa (Lorenzen dan Lorenzen 2011).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang ada di *Subak Delod Sema* Desa Penarukan tidak melibatkan semua *krama subak*, melainkan hanya melibatkan beberapa *prajuru subak* dan *krama* yang menjadi panitia dalam setiap kegiatan di *subak*. Pihak-pihak tersebut yakni, *Kelihan Subak/Pekaseh*, *Penyarikan/ Sekretaris*, *Petengen/ Bendahara*, *Kelihan Tempekan/ Kepala Bagian* dan *krama* yang ditunjuk sebagai panitia dalam upacara *Ngusaba Desa* atau kegiatan lain di *subak*. Sedangkan dalam proses pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengelolaan keuangan dana internal dan pengelolaan dana eksternal. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan dana internal adalah pengelolaan dana yang bersumber dari *peturunan krama subak*, sedangkan pengelolaan dana eksternal adalah pengelolaan

dana bantuan yang berasal dari pemerintah. Kedua jenis pengelolaan keuangan ini dipertanggungjawabkan dengan cara yang berbeda. Pengelolaan keuangan dalam upacara *Ngusaba Desa* dilakukan secara sederhana, pengurus *subak* hanya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan cara mengemukakan pemasukan yang diperoleh serta rincian biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan upacara. Pencatatannya dilakukan secara sederhana. Sementara, pengelolaan dana eksternal yang berasal dari Hibah Gubernur Bali dikelola dengan sistem yang lebih baik dan sesuai prosedur laporan pertanggungjawaban dari lurah. Laporan yang dibuat bersifat lengkap, mulai dari detail transaksi terkait, jumlah pengeluaran, bukti transaksi, absensi *krama subak*, hingga dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

*Prajuru* dan segenap *krama Subak Delod Sema* Desa Penarukan memahami bahwa akuntansi merupakan instrumen yang perlu diterapkan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di *Subak Delod Sema* dapat dilihat dari beberapa unsur pembentuk akuntabilitas yang telah berhasil diterapkan di *Subak Delod Sema*. Meskipun pengelolaan keuangan yang dilakukan di *Subak Delod Sema* sangat sederhana, *krama subak* tidak menuntut laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, sistem pertanggungjawaban yang sederhana dirasa lebih berfungsi dalam *subak*, karena tingkat pendidikan sebagian *krama subak* masih rendah. Selain itu, kepercayaan antar *krama*, kepercayaan dengan hukum karma pala dari Tuhan dan nilai-nilai agama Hindu lainnya merupakan bagian dari tanggungjawab interen *prajuru subak* yang menuntut mereka untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan *subak* dengan baik dan benar, dan 4) praktik akuntabilitas yang ada pada *Subak Delod Sema* Desa Penarukan tidak terlepas pula dari perkembangan kearifan lokal budaya setempat, yakni konsep *Pade Gelahang*. *Pade Gelahang* yang berarti memiliki secara bersama-sama, telah mendarah daging dalam diri setiap diri *krama subak*. Sehingga baik *krama subak* Hindu maupun Islam, terintegrasi secara bersama-sama untuk selalu berbuat lebih baik dari organisasi. Selain itu, konsep *Pade Gelahang* telah menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama *krama subak*. Hal ini tentunya berimbas pada per-



tanggungjawaban keuangan *subak* yang dimaknai menjadi tanggung jawab bersama oleh *krama subak*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu, seluruh organisasi yang ada utamanya yang bersifat tradisional dan bersifat keagamaan seperti *subak*, hendaknya mampu mempergunakan sistem akuntansi yang diterapkan secara konsisten, bagaimanapun proses pengelolaan keuangan yang dilakukan, darimanapun dana tersebut berasal, hendaknya akuntansi dapat dijadikan acuan utama untuk mengukur akuntabilitas publik suatu organisasi. Selain itu, akuntabilitas yang dilakukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mampu merubah pemahaman setiap anggota organisasi bahwa akuntabilitas bukan sekedar upaya yang dilakukan untuk menjaga citra pemimpin, tetapi merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menjaga organisasi agar tetap bertahan dan berkesinambungan. Perkembangan kearifan budaya lokal selain *Tri Hita Karana*, juga perlu dipandang penting sebagai landasan dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi. Karena sesungguhnya perkembangan *pakem-pakem* budaya lokal menambah *keajegan* dari organisasi itu sendiri, apalagi organisasi tersebut merupakan organisasi sosial-religius seperti *subak*.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang melingkupi penelitian ini, baik keterbatasan dalam penggunaan pendekatan maupun yang berkaitan dengan proses penelitiannya sendiri. Keterbatasan pertama yaitu, keterbatasan dalam hal pengumpulan data. Peneliti mempunyai waktu yang terbatas untuk menggali informasi yang mendalam dengan para informan yang disebabkan karena banyak informan yang memiliki kesibukan. Keterbatasan kedua yakni, mengenai hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi, mengingat bahwa lokasi penelitian yang digunakan hanya satu sehingga persepsi, sikap, perilaku, nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian memungkinkan untuk sangat berbeda pada lokasi penelitian lainnya. Keterbatasan ketiga yaitu, keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh peneliti untuk menjangkau, mengenali, mengungkap, ataupun menganalisa pendapat informan maupun fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, A.T. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Penerbit Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Atmadja, A.T. 2013. "Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.2 No.1, hlm.24-26.
- Budiasih, I.G.A.N. 2014. "Fenomena Akuntabilitas Perpajakan pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.5, No.3, hlm 409-420.
- Field, L. 2007. *Business and the Buddha: Doing Well by Doing Good*. Penerbit Wisdom Publication. Sommerville, MA.
- Griadhi, Wirtha. 1993. *Subak Dalam Perspektif Hukum: Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Edisi Pitana. Penerbit Upada Sastra. Denpasar.
- Hopper, T. dan A. Powell. 1985. "Making Sense of Research into the Organizational and Social Aspects of Management Accounting : A Review of Its Underlying Assumptions." *Journal of Management Studies*, Vol. 22, No.5, hlm 429-465.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Penerbit Retika Aditama. Bandung.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Lorenzen, R.P., dan S. Lorenzen, 2011. "Changing Realities-Perspective on Balinese Rice Cultivation." *Human Ecology an Interdisciplinary Journal*, Vol. 39, No.1, hlm 29-42.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Neuman, W.L. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi 7. Penerbit Pearson Education Inc. Boston, NY.

- Pertiwi, I.D.A.E. dan U. Ludigdo. 2013. "Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Gita Karana." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No.3, hlm 430-507.
- Triuwono, I. 2012. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori. Edisi 2. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Wardi, I.N., Laksmiwati, L.A.A., Gunadi, I.G.A., dan As-syakur, A.R. 2014. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Budaya Subak: Studi Kasus di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol.14, No.2, hlm 110-124.
- Widnyani, N.M.S., Atmadja, A.T., Yuniarta, G.A. 2015. Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Lembaga Lokal *Subak* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan (Studi Kasus pada *Subak* Tabola, desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem). Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yulianita, Dewi Ni Wayan. 2008. Akuntabilitas dan Bingkai Filosofis Tri Hita Karana: Suatu Eksplorasi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Brawijaya Malang.